

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1003 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi yang berdampak pada peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta guna mewujudkan tata pemerintahan baik, kelola yang perlu menyelenggarakan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan secara terencana dan terarah;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan, perlu menyusun road map reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MENETAPKAN:

Memutuskan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ROAD

MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN

PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024.

KESATU

: Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 merupakan panduan dalam melaksanakan rencana kerja tahunan atau rencana aksi reformasi birokrasi serta mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

-4-

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1003 TAHUN 2020 TENTANG

4	K INDONESIA TAHUN 2020-2024
	PERDAGANGAN REPUBLI
	RMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
IENIANG	ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Denongming Tawah	5000	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Pimpinan Tinggi Madya	Pimpinan Tinggi Madya	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan	Pusat Data dan Sistem Informasi
	2024	7	7	7	7	7
an	2023	7	7	7	7	7
Pelaksanaan	2022	7	7	7	7	7
Pela	2020 2021 2022 2023 2024	7	7	7	>	
	2020	7	7	. 3	7	
	Кедлаган	Penetapan Pimpinan Tinggi Madya sebagai ketua pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja	Internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap pegawai dilingkungan unit kerja oleh pimpinan unit kerja	Menerapkan prinsip budaya kerja kementerian perdagangan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan pada setiap pegawai dilingkungan unit kerjanya	Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model	Melakukan pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0
	Indikator	Meningkatnya komitmen dalam melakukan Reformasi Birokrasi			Perubahan pola pikir dan budaya Pengembangan dan kerja birokrasi Penguatan peran ag perubahan dan role	
Program / Area	No Perubahan	1 Manajemen Perubahan	-			

	Program / Area				Pel	Pelaksanaan	lan		
<u> </u>	. ਸ਼	Indikator	Kegiatan	2020	2021		2022 2023	2024	Fenanggung Jawab
			Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan RB (Rencana Kerja Tahunan)	7	7	7	7	7	Biro Organisasi dan Kepegawaian
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan	Penerapan Manajemen Resiko	7	7	7	7	7	Inspektorat Jenderal
લં	Penataan Peraturan Perundangan/Deregu Iasi Kebijakan	Penataan Peraturan Regulasi yang lebih tertib, tidak Perundangan/Deregu tumpang tindih dan kondusif lasi Kebijakan	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi Pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan);	7 .	7	٢	٨	٢	Biro Hukum
			Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;		٨	٨	٨	٨	Biro Hukum
			Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Instansi Pemerintah	>	7	7	٨	٨	Biro Hukum
			Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	7	٨	٨	٨	٨	Biro Hukum
			Evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.		7	7	7	٢	Biro Hukum

i

;	Program / Area				Pel	Pelaksanaan	lan		demol. natmnacaed
20	Perubahan	Indikator	negratan	2020	2021	2022	2022 2023 2024	2024	renanggung oawan
	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	Penataan Organisasi/ Terwujudnya kebijakan tentang Kelembagaan manajemen jabatan yang mendukung pelaksanaan manajemen SDM	Asessment organisasi berbasis kinerja				٨	٢	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		Terwujudnya Kementerian Perdagangan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan bersinergi dengan lembaga lain	Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;				٨	٨	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.		٨				Biro Organisasi dan Kepegawaian
4.	Penataan Tata Laksana	gkatnya penerapan sistem sis <i>e-government</i> (indeks	Penerapan Tata Kelola SPBE	٦					Pusat Data dan Sistem Informasi
		SPBE)	Penerapan Manajemen SPBE	٨					Pusat Data dan Sistem Informasi
		,	Penerapan Layanan SPBE	٨				`.	Pusat Data dan Sistem Informasi
			Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	٨					Pusat Data dan Sistem Informasi
			Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)	7					Biro Umum
		Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan	Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	٦	7	٨	٨	٨	Unit Kerja
		di Kementerian Perdagangan (indeks pengawasan kearsipan)	Mengimplementasikan digitalisasi arsip		٨	٨	٨	٨	Unit Kerja
		Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa secara transparansi (indeks pengelolaan keuangan) (indek pengelolaan Aset)	Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	٦	٨	٨	٨	٨	Biro Keuangan

	Program / Area				Pel	Pelaksanaan	aan		•
No	Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2022 2023 2024	Fenanggung Jawab
		Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan	7	7	7	7	7	Biro Umum
			Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	7	7	7	7	7	Biro Hubungan Masyarakat
		Terlaksananya kegiatan dilingkungan Kementerian	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;		٢			7	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		Perdagangan sesuai dengan Sistem dan Prosedur kerja	Penyelarasan Proses bisnis dan SOP		٨			٢	Biro Organisasi dan Kepegawaian
Ŋ	5 Sistem Manajemen SDM	pelaksanaan sistem promosi secara terbuka sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Perumusan dan penetapan kebijakan kebijakan sistem promosi secara terbuka		7				Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Evaluasi terhadap Kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan		7	٨	7	7	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		pelaksanaan penilaian kinerja pegawai kementerian perdagangan sesuai dengan	Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai	٨					Biro Organisasi dan Kepegawaian
		prosedur dan ketentuan yang berlaku	Penerapan kebijakan penilaian kinerja pegawai	٨	٦	٦	٨	٢	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		pelaksanaan penilaian kinerja pegawai kementerian perdagangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Monitoring dan evaluasikebijakan penilaian kinerja pegawai		7	7	7	7	Biro Organisasi dan Kepegawaian

terlaksanan dan punishu pegawai ASI dan ketentu Pegawai ASI Pegawai ASI Raderisasi p lingkungan Perdagangan	2	Program / Area				Pel	Pelaksanaan	an		10000
terlaksananya skema reward dan penetapan dan penetapan dan penetapan pegawai ASN dera pag sehuruh pegawai ASN yang kompeten sistem rekruitmen dan seleksi secara i mangaran dan berbasis kinerja wan ketentuan yang berlaku Penerapan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja kompoten sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi mpengaran dan berbasis kompetensi monitoring dan evaluasi mpengawai ASN dan pengawai ASN dan pengawai ASN dan pengawai ASN dan pengawai ASN pengawai ASN dan pengkaderan pengkada pengkada pengkangan pengkada pengkangan pengkangan pengk	0 2	Perubahan	Indikator	Neglatan	2020		2022		2024	renanggung Jawan
Penerapan kebijakan reward dan bunishment berbasis kinerja Monitoring dan evaluasikebijakan reward dan punishment berbasis kinerja Monitoring dan evaluasi kinerja Penyempurnaan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi rekruitmen dan seleksi secara kransparan dan berbasis kompetensi molementasi kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi molementasi kebijakan sistem pengkaderan dan berbasis kompetensi melingkungan Kementerian berbasis kompetensi pegawai ASN di Penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi Kebijakan sistem pengkaderan den bergawai ASN Monitoring dan evaluasi Kebijakan sistem pengkaderan den bergawai ASN Monitoring dan evaluasi Mengawai ASN Penerapan ASN Monitoring dan evaluasi Mengawai ASN			terlaksananya skema reward dan punishment bagi seluruh pegawai ASN dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Perumusan dan penetapan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja		7				Biro Organisasi dan Kepegawaian
Monitoring dan reward dan punishment berasis kinerja segawai ASN yang kompeten sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem pengkaderan sistem pengkaderan pegawai ASN di Pertumusan dan penetapan lingkungan Kementerian pergawai ASN pengkaderan pegawai ASN pengkaderan pengkaderan pegawai ASN pengkaderan pengkaderan pengkaderan pengkada pengkada pengkada pengkada pengkada pengkada pengkada pengkada pengkada pengk				Penerapan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja		>	٨	7	٨	Biro Organisasi dan Kepegawaian
Pegawai ASN yang kompeten sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi rakruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi Monitoring dan evaluasi imphementasi kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan seleksi secara transparan dan seleksi kaderisasi pegawai ASN di Perumusan dan penetapan lingkungan Kementerian pegawai ASN Pengangan Pengawai ASN				Monitoring dan evaluasikebijakan reward dan punishment berbasis kinerja		7	٨	7	7	Biro Organisasi dan Kepegawaian
rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi kaderisasi pegawai ASN di Perumusan dan penetapan lingkungan Kementerian pegawai ASN Penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan V V V Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan V V V Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan			Pegawai ASN yang kompeten	Penyempurnaan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi		·				Biro Organisasi dan Kepegawaian
Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi kaderisasi pegawai ASN di Perumusan dan penetapan lingkungan Kementerian kebijakan sistem pengkaderan Pencrapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan y y y pegawai ASN Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan				rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi		٨	٨	٨	٧	Biro Organisasi dan Kepegawaian
kebijakan sistem penetapan lingkungan Kementerian kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN Perdagangan Perdagangan Penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN Wegawai ASN				Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi		7	٨	7	٨	Biro Organisasi dan Kepegawaian
Penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN			kaderisasi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN		7				Biro Organisasi dan Kepegawaian
Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN				Penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN			7	7	7	Biro Organisasi dan Kepegawaian
				Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN				7	7	Biro Organisasi dan Kepegawaian

	Program / Area				Pel	Pelaksanaan	an		
2	Perubahan	Tindikator	Keglatan	2020	2021	2022	2022 2023	2024	Fenanggung Jawab
		tersedianya data <i>gap competency</i> para pemangku jabatan	Perumusan dan penetapan kebijakan Pengukuran <i>gap</i> <i>competency</i> antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan		7	7			Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penerapan kebijakan Pengukuran <i>gap competency</i> antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan			7	7	7	Biro Organisasi dan Kepegawaian
	•	·	Monitoring dan evaluasikebijakan Pengukuran <i>gap competency</i> antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan				7	7	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		Implementasi sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ASN	٨	٨	٨	٨	>	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penerapan kebijakan sistem informasi ASN	٨	٨	٨	٨	٨	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		tercapainya pendidikan dan Perumusan dan penetapan pelatihan yang berkualitas kebijakan Penguatan sistem untuk mewujudkan pegawai ASN dan kualitas pendidikan dan yang berkinerja kinerja	Perumusan dan penetapan kebijakan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja	7					Biro Organisasi dan Kepegawaian

-	Program / Area	1			Pel	Pelaksanaan	lan		,
No No	Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021 2022 2023 2024	2022	2023	2024	renanggung Jawan
		tercapainya pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk mewujudkan pegawai ASN kualitas pendidikan dan yang berkinerja kinerja	Penerapan kebijakan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja		7				Biro Organisasi dan Kepegawaian
<u> </u>			Monitoring dan evaluasikebijakan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja		7		:		Biro Organisasi dan Kepegawaian
		lulusan diklat yang kompeten dan memiliki integritas	Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan	7					Biro Organisasi dan Kepegawaian
	•	:	Penerapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan	7	7	٨	7	<i>P</i>	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan	7	7	7	7	7	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		t center i	Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center		٨				Biro Organisasi dan Kepegawaian
		lingkungan Kementerian Perdagangan	Penerapan dan pemanfaatan assessment center		7				Biro Organisasi dan Kepegawaian

	Program / Area				Pel	Pelaksanaan	ıan	1 4	
S S		Indikator	Kegiatan	2020		2022	2021 2022 2023	2024	Penanggung Jawab
			Monitoring dan evaluasikebijakan pemanfaatan assessment center		٨				Biro Organisasi dan Kepegawaian
		pejabat yang kompeten	Penerapan sistem promosi secara terbuka	٨					Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasipenerapan sistem promosi secara terbuka	7					Biro Organisasi dan Kepegawaian
		transparansi jalur karier pegawai Penyempurnaan kebijakan ASN pola karier pegawai ASN	Penyempurnaan kebijakan pola karier pegawai ASN			٨			Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penerapan kebijakan pola karier pegawai ASN			٨			Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasikebijakan pola karier pegawai ASN				٨		Biro Organisasi dan Kepegawaian
		terciptanya data base profil Perumusan dan penetapan kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN yang dapat digunakan pemanfaatan/pengembangan dalam manajemen SDM data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN	Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN			٢			Biro Organisasi dan Kepegawaian
			pemanfaatan dan pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN			7			Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasipemanfaatan/pengem bangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN				7		Biro Organisasi dan Kepegawaian

	Drogram / Area				Pel	Pelaksanaan	an		
No	Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2022 2023 2024	Penanggung Jawab
9	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting);	7					- Inspektorat Jenderal - Biro Keuangan - Biro Perencanaan
		Tertelusurnya/ tercerminnya Penguatan keterlibatan kinerja pimpinan dan seluruh individu penanggung jawab dal perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasikinerja, serta pelaporan kinerja	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasikinerja, serta pelaporan kinerja	7					Biro Perencanaan
		Terukurnya kinerja organisasi yang didukung oleh kinerja individu	Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade);	٨	•				- Biro Keuangan - Biro Perencanaan - Pusat Penanganan Isu Strategis - Biro Organisasi dan Kepegawaian
		Terukur dan tertelusurnya seluruh kegiatan organisasi dengan adanya IKP	Pelaksanaan monitoring dan evaluasikinerja secara berkala;	7					- Biro Keuangan - Biro Perencanaan
		Keterbukaan informasi terkait pelaporan kinerja Kementerian	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;	7				_	Biro Perencanaan
		Tertelusurnya proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;	7					- Biro Keuangan - Biro Perencanaan

	Dromom / Area				Pel	Pelaksanaan	aan		
8 Z		Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Penanggung Jawab
		Onini BDK, DI atas I anoran	Menunicuman lanoran						
		Keuangan Kementerian	keuangan sesuai dengan	~					Biro Keuangan
)	ketentuan						b
7	Pengawasan		Melakukan Penguatan						
_			implementasi SPIP di seluruh	7					Sekretariat
		Persentase meningkatnya jumlah bagian organisasi;	bagian organisasi;	-					Inspektorat Jenderal
		pegawai yang memahami SPIP	i						
			Meningkatkan Kompetensi	•					Sekretariat
			APIP	>					Tonnoltonot Tondonol
		Jumlah Auditor bersertifikat Ahli							inspektorat Jenderai
			Pemenuhan Rasio APIP						0.1
		Jumlah Rekomendasi strategis	(pemenuhan jumlah ideal	>					Sekretariat
		untuk bahan masukan Pimpinan aparatur pengawas)	aparatur pengawas)						inspektorat Jenderai
		Persentase Hasil Pemeriksaan	Melakukan pengelolaan dan						
		yang dapat ditindaklanjuti	akuntabilitas keuangan	-					Sekretariat
			sesuai kaedah dan aturan	> -					Inspektorat Jenderal
			yang berlaku	·					•
		Menurunnya risiko/tingkat	Melakukan pengelolaan						
		kesalahan yang disebabkan	barang dan jasa sesuai aturan	7					Sekretariat
		kesalahan pengelolaan barang							Inspektorat Jenderal
		dan jasa							
			Pembangunan unit kerja Zona	-					Sekretariat
		Jumlah unit yang ditetapkan	Integritas Menuju	>					Inspektorat Jenderal
		memenuhi kategori Zl	WBK/WBBM						
		Indeks anti Gratifikasi	Penguatan Pengendalian						Sekretariat
			gratifikasi	>					Inspektorat Jenderal
									4
		Tingkat Kepuasan penanganan	Penguatan penganganan	_					Sekretariat
		pengaduan masyarakat yang	pengaduan dan komplaın	>					Inspektorat Jenderal
		lei tangann							

No	Dromom / Area				Pel	Pelaksanaan	aan		
	Perubahan	Indikator	Kegiatan	2020		2022	2021 2022 2023 2024	2024	renanggung Jawan
		Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan	Penguatan efektivitas manajemen risiko	7					Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Persentase jumlah aduan lewat WBS yang tertangani	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	٨					Sekretariat Inspektorat Jenderal
8 Pe	Pelayanan Publik	Kemudahan akses dokumen informasi publik	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);	7					Unit Pelayanan Publik
·		· ·	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan						Biro Hubungan Masyarakat
			Menyelesaikan pengaduan sesuai SOP						Biro Hubungan Masyarakat
		·	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;						Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

	Program / Area				Pela	Pelaksanaan	đ	
<u>8</u>		Indikator	Kegiatan	2020	2021	2022 2	2020 2021 2022 2023 2024	renanggung Jawan
			Penciptaan dan		-			
			pengembangan inovasi					Sekretariat Direktorat
			pelayanan publik dalam					Tenderal Perdagangan
			rangka percepatan					I nor Negeri
			peningkatan kualitas					Lua negen
			pelayanan publik;					
			Pengukuran kepuasan					
			masyarakat secara berkala;					Sekretariat Direktorat
								Jenueral Feruagangan
						<u>_</u>		Luar Negen
			Pelaksanaan monitoring dan					
			evaluasi					Sekretariat Direktorat
			pelaksanaan kebijakan	•				Jenderal Perdagangan
			pelayanan publik secara					Luar Negeri
			berkala;					
			Meningkatkan tindak lanjut					
			dari Laporan Hasil Survei		-			Sekretariat Direktorat
			Kepuasan Masyarakat.					Jenderal Perdagangan
								Luar Negeri